



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 903 / 3008 / TAPD
900 / 176 / DPRD-B
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. a. Nama : M. KEBING L
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- b. Nama : Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- c. Nama : H SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- d. Nama : Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pontianak, 16 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Selaku
PIHAK KEDUA



M. KEBING L
KETUA

Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
WAKIL KETUA

H. SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
WAKIL KETUA

Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai amanat ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua Undang Undang tersebut sama-sama mengamanatkan adanya jaminan terhadap konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

KUA dan RKPD tahun 2023 merupakan dokumen pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang

memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi – asumsi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan, kebijakan belanja serta kebijakan pembiayaan daerah.

I.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Memproyeksikan perkembangan asumsi ekonomi makro
3. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
4. Sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

I.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

KUA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
-

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Barat merujuk pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat (Perda Nomor 1 Tahun 2021) melalui program prioritas untuk membangun daerah. Tahun 2023 adalah Tahap Pemantapan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Tahap ini sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pemantapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023, tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2021 yang menjadi momentum pertumbuhan ekonomi, proyeksi tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023 dimana dampak pandemi Covid-19 diperkirakan

masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023. Disisi lain Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 juga tidak terlepas dari Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 sudah kembali ke zona positif, setelah pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan negatif 2,07% yoy. Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi dan hingga kuartal IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sudah mencapai 3,69 persen (c to c).. Pada Triwulan-IV 2021, angka ekonomi mencetak nilai pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 5,02% (y.o.y) dibandingkan dengan tren pelemahan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya yakni sebesar 3,51% (y.o.y). Pertumbuhan pada Triwulan-IV 2021 kemudian menghasilkan pertumbuhan keseluruhan PDB Indonesia di tahun 2021 menjadi 3,69% (y.o.y) atau lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan negatif pada tahun lalu sebesar -2,07% (y.o.y). Dengan kata lain, angka pertumbuhan pada Triwulan-IV berada pada jangkauan target pertumbuhan pemerintah yakni di antara 3,50% (y.o.y) hingga 4,00% (y.o.y). Melihat ke sisi sektoral, hampir semua sektor mencatatkan pertumbuhan positif yang didukung oleh relaksasi pembatasan setelah selesainya gelombang kedua pandemi.

Dari semua sektor, sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi serta aktivitas makanan dan minuman merupakan sektor yang mencatatkan perubahan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terkait dengan aktivitas bisnis dan produksi yang kembali berjalan seiring dengan pelonggaran PPKM yang kemudian terefleksi dari pertumbuhan PDB untuk masing-masing sektor tersebut. Melihat pada komponen konsumsi rumah tangga, pada Triwulan-IV 2021 tercatat adanya peningkatan menjadi 3,55% (y.o.y) tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan 1,02% (y.o.y) pada kuartal sebelumnya.

Tabel 2.1
Laju PDB Lapangan Usaha ADHK 2020

| PDB Penggunaan (Seri 2010) | ADHK (Rp. Miliar) | | Laju Pertumbuhan (%) |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | 2019 | 2020 | |
| Konsumsi Rumah tangga | 5.780,2 | 5.896,7 | 2,02 |
| Konsumsi LNPRT | 130,2 | 132,3 | 1,59 |
| Konsumsi Pemerintah | 872,6 | 909,2 | 4,17 |
| PMTB | 3.419,7 | 3.549,2 | 3,80 |
| Ekspor | 2.092,0 | 2.592,7 | 24,04 |
| Impor | 1.740,2 | 2.101,4 | 23,31 |
| Produk Domestik Bruto | 10.722,4 | 11.118,9 | 3,69 |

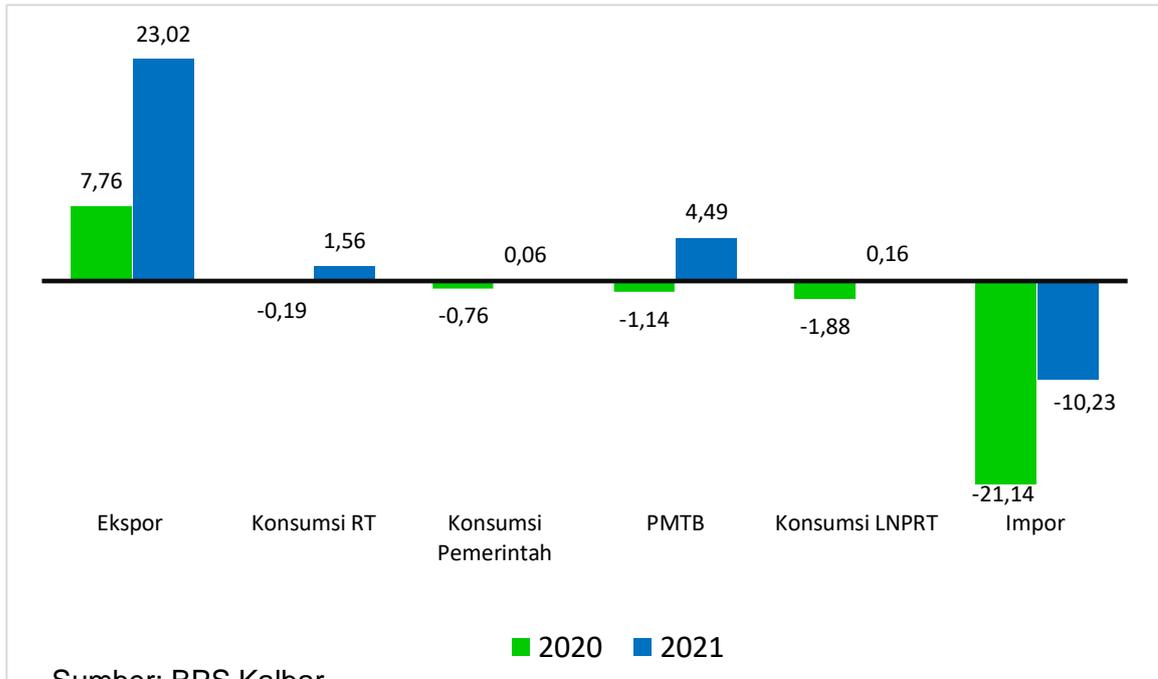
Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2023

Pertumbuhan ekonomi Kalbar hingga pada kuartal IV tahun 2021 mencapai 4,78% (c to c) sedangkan secara nasional tumbuh 3,69% yang artinya capaian pertumbuhan ekonomi masih lebih baik secara rata-rata seluruh provinsi di Indonesia. Ini mencerminkan bahwa pemulihan kinerja ekonomi Kalimantan Barat sudah berjalan baik dan menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari triwulan I hingga triwulan IV-2021 mencapai Rp 231,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 141,2 triliun.

Pada sisi Pengeluaran PDRB, tahun 2020 hanya Ekspor saja yang tumbuh, pada tahun 2021 sudah terdapat 5 komponen yang tumbuh dan hanya Impor yang tetap mengalami kontraksi, Pertumbuhan tertinggi di tahun 2021 terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,02 persen; diikuti Komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) sebesar 4,49 persen, Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,56 persen, Komponen LNPRT (Lembaga Non Profit Rumah Tangga) sebesar 3,72 persen, dan Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 3,18 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa terkontraksi cukup dalam

sebesar 10,23 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (%) Tahun 2021



Perkiraan kondisi ekonomi Kalimantan Barat tahun 2022 lebih baik dibanding 2021, dengan asumsi sudah dalam pemulihan dampak Covid 19 (vaksinasi diatas 80%) dan menggeliatnya sektor produksi seiring mulai beroperasinya Pelabuhan Kijing. Konsumsi rumah tangga berkontribusi 53,05% pada total PDRB Kalbar dengan pertumbuhan sebesar 2,10 - 2,42% di tahun 2022. Artinya sebagai konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dari sisi pengeluaran yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalbar dibanding komponen pengeluaran PDRB lainnya. Keadaan ini bisa sama atau diatas di tahun 2021 dengan pertimbangan inflasi tetap terkendali pada level rendah dan stabil yaitu 3 plus minus 1%, Inflasi juga diharapkan terjaga karena upaya koordinasi kebijakan yang kuat lewat TPID baik di tingkat pusat dan daerah.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada

tahun 2020 dan 2021 diperkirakan terus memberikan dampak bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi kedepannya membawa dampak baik pula terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, tingkat kesenjangan (Rasio Gini), dan Indeks Pembangunan Manusia (Tabel 2.3).

Tabel 2.3
Target Indikator Makro Pembangunan

| Indikator Makro Pembangunan | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,74 - 5,46 | 5,02 - 5,68 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 70,29 | 71,25 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,53 - 4,29 | 5,42 - 3,98 |
| Angka Kemiskinan (%) | 7,31 - 7,23 | 7,08 - 7,00 |
| Gini Rasio | 0,323 - 0,321 | 0,321 - 0,318 |

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2023

II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keuangan daerah, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kedepan, ada dua aspek dalam manajemen keuangan daerah yang mendesak dan perlu dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Dukungan sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah, mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hal lain yang tak kalah pentingnya, melalui sistem ini terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional memiliki posisi tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah.

Secara legal formal, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan tentang arah kebijakan keuangan daerah, meliputi atas Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023, maka proyeksi total Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp5.851.838.865.428. Rincian proyeksi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | = | Rp3.029.176.056.332 |
| 2. Pendapatan Transfer | = | Rp2.763.254.771.096 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | = | Rp59.408.038.000 |

Adapun untuk proyeksi total Belanja Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp6.120.979.866.600 dengan komposisi empat kelompok belanja antara lain:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. Belanja Operasi | = | Rp3.654.999.033.932 |
|--------------------|---|---------------------|
-

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 2. Belanja Modal | = | Rp1.147.872.112.568 |
| 3. Belanja tidak terduga | = | Rp30.000.000.000 |
| 4. Belanja Transfer | = | Rp1.288.108.720.100 |

Terakhir, perkiraan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp319.141.001.172 menurun jika dibanding tahun 2021 (Rp22.342.528.252). Ini menggambarkan upaya pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam rangka perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang efisien dan mengurangi proyek kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan/mangkrak di masa mendatang dan secara teknikal tidak mudah memperkirakan SiLPA hingga mendekati nol. Sedangkan pada penyertaan modal (investasi) daerah diproyeksikan sebesar Rp50.000.000.000.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

III.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Makro Ekonomi tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,3% hingga 5,9%. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga kedepan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan. Adapun asumsi makro yang disepakati untuk Tahun Anggaran 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,9%.
2. Inflasi berada pada kisaran 2,0%-4,0%.
3. Nilai Tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.300-Rp14.800 per USD.
4. Suku Bunga SUN 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 7,34-9,16 persen.
5. Harga Minyak Mentah/ICP 80-100 USD per barel.
6. Lifting Minyak Mentah 619.000-680.000 barel per hari.

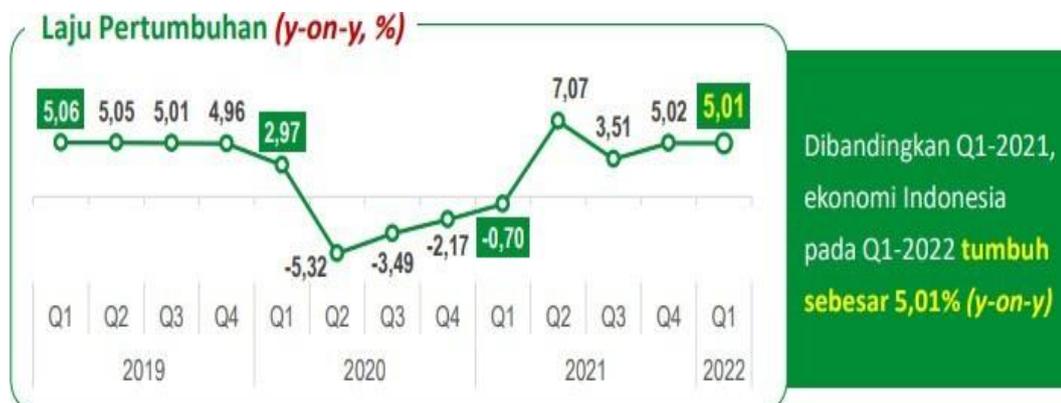
Lifting gas bumi 1,019 juta-1,107 juta barel setara minyak per hari. Perekonomian Indonesia di tahun 2022 masih berada pada masa pemulihan selama pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga saat

ini. Rilis PDB kuartal I/2021 menunjukkan proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen.

Tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat, Sepanjang Triwulan I-2022 kinerja perekonomian nasional dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. Secara global, konflik Rusia-Ukraina berdampak kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar Internasional dan menjadi pengungkit nilai ekspor. Secara domestik, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menjadi pengungkit peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi Covid-19, karena jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 masih cukup besar, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan pergerakan inflasi yang menguat sepanjang Triwulan 1-2022.

Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi 2022



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik

Hingga Juni 2022, laju inflasi inti menunjukkan peningkatan dibandingkan periode tahun sebelumnya yang menggambarkan kenaikan harga ditengah masyarakat. Dampak Perang Rusia-Ukraina selain memberikan keuntungan pada komoditi ekspor namun menyebabkan peningkatan harga di dalam negeri yang disebabkan ketersediaan/supply barang impor menjadi terbatas. Laju inflasi secara umum diperkirakan akan terus meningkat sepanjang 2022. Pemerintah berharap perekonomian domestik dapat dikendalikan melalui pengendalian inflasi serta penguatan kinerja ekspor terhadap komoditi unggulan dan pengurangan konsumsi dari Impor sehingga diharapkan laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada kisaran sasaran inflasi 2022, yaitu sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$.

Sementara pada tahun 2023, laju inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi 2,0%-4,0%. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsel 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif.

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS dalam 10 tahun terakhir secara umum cenderung mengalami depresiasi, yang lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang turut berpengaruh pada beberapa variabel ekonomi makro domestik dimana nilai tukar sempat terkoreksi cukup dalam akibat kekhawatiran dampak pandemi terhadap kinerja ekonomi. Tekanan tersebut terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestik yakni di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020. Pada tahun 2022 kondisi geopolitik di tingkatan global menyabkan ketidakpastian dari sisi perekonomian. Namun demikian, respon kebijakan

pemerintah dan otoritas sektor moneter dan keuangan yang cepat, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mampu mengembalikan kepercayaan investor global dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, kemajuan positif dari penemuan vaksin COVID-19 menjadi salah satu faktor penting terjaganya nilai tukar di penghujung tahun. Pada akhir tahun 2021, nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp 14.105 atau terdepresiasi 1,5% dibandingkan akhir tahun 2019.

Pada tahun 2021, perkembangan tingkat suku bunga SUN 10 tahun mula-mula sempat bergerak naik hingga di atas level 8% pada pertengahan tahun. Namun suku bunga SUN 10 tahun kemudian bergerak menurun seiring pelonggaran likuiditas global akibat kebijakan penurunan suku bunga beberapa negara maju dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Selain itu, pengelolaan fiskal yang pruden yang didukung sinergi dengan Bank Indonesia dalam skema pembiayaan anggaran juga mendorong sentimen positif pasar keuangan domestik. Pada akhir tahun, tingkat SUN 10 tahun bahkan berada level rendah yakni 5,86% dan selanjutnya, rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun 2021 berada pada level 6,95%.

Stabilitas pasar keuangan global, pengelolaan dan kinerja fiskal yang kuat, dan tren inflasi yang tetap terjaga akan mendorong suku bunga SUN 10 Tahun yang rendah. Hal ini akan memberikan dampak efisiensi belanja APBN khususnya belanja bunga utang. Namun, pada tahun 2023, dengan kondisi ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina, meningkatnya Tensi Politik antara China dan Amerika Serikat serta Masalah kesehatan global maka rata-rata suku bunga SUN diperkirakan akan meningkat. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 Tahun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal dan resiko ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun kedepan. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun memiliki peluang melanjutkan tren penurunan di tahun 2023 seiring dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tepat.

Harga minyak terus meningkat di awal hingga pertengahan tahun 2022 seiring dengan kekhawatiran pelaku pasar minyak akibat ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia lantaran ketidakmampuan OPEC untuk memenuhi target kuota produksi. Selain itu faktor lain yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia adalah pengenaan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador dan Nigeria serta produksi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang berdasarkan kuota produksi telah mendekati kapasitas produksi maksimum.

Mengikuti Perkembangan harga minyak mentah dunia, pergerakan ICP juga mengalami peningkatan sepanjang semester II 2020 dan terus berlanjut hingga awal tahun 2022. Mengikuti perkembangan harga Brent, ICP berada di kisaran US\$63,5/barel pada Maret 2021. Harga masih diperkirakan meningkat secara bertahap seiring ekspektasi meredanya wabah sehingga permintaan minyak secara global mulai membaik meskipun masih di bawah tingkat sebelum pandemi. Disisi lain ketidakpastian produksi minyak mentah global membuat kekhawatiran para produsen minyak mentah yang menyebabkan hingga Juni 2022 harga minyak mentah dunia berada pada tingkat US\$117,62/barel. Peningkatan harga minyak mentah dunia ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja ekspor Indonesia sebagai salah satu produsen minyak mentah dunia. Namun dapat memberikan dampak negatif bagi impor BBM yang menyebabkan tekanan harga BBM dalam negeri yang berdampak dalam peningkatan subsidi energi dalam negeri.

Kinerja *lifting* di tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi tekanan dan risiko penurunan akibat permasalahan fundamental penurunan alamiah pada sumber produksi utama dan dampak pandemi COVID-19 serta ketidakpastian kondisi geopolitik dan perekonomian global. Meski demikian harga minyak global yang kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas hulu migas. Peningkatan harga minyak diharapkan menjadi momentum peningkatan aktivitas proyek hulu migas yang sedang dikembangkan dan

diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja *lifting* migas.

Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan program rutin KKKS sesuai dengan komitmennya dalam *Work Program and Budget* (WP&B). Di tahun 2021, pemerintah dan KKKS telah menyepakati pengeboran sebanyak 616 sumur atau dua kali lipat dari realisasi pengeboran di tahun 2020. Selain pengeboran upaya perawatan dan kerja ulang sumur juga dilakukan untuk menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan.

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan plan of development dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan *lifting*. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019-1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023

III.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat tahun 2023 telah diproyeksikan dalam Perubahan RPJMD 2018 – 2024 akan mencapai 5,02 sampai dengan 5,68 persen, dengan inflasi terjaga dalam kisaran 3 ± 1 persen. Dalam mencapai hal tersebut, tentu memerlukan integritas, inovasi,

serta transformasi sektor-sektor ekonomi dan juga jaminan kenyamanan hingga kepastian bagi para investor.

Struktur perekonomian Kalimantan Barat masih tergantung pada sektor primer, yang dalam hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan sector pertambangan dan sektor pertanian di tahun 2021. Pada pertambangan seperti bauksit dan alumina, serta perkebunan sawit cukup mendominasi dalam devisa ekspor, membuat perekonomian Kalimantan Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Pada sisi ekspor dan impor diprediksi mengalami perlambatan terutama ekspor CPO sawit ke negara-negara di Eropa yang saat ini pula melakukan lockdown atau mengurangi operasi pabrik industrinya, juga negara China yang banyak mengimpor bahan setengah jadi dari Kalimantan Barat.

Asumsi makro ekonomi Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Inflasi

Tingkat inflasi diasumsikan stabil pada rentang sasaran 3 plus minus 1 (3 ± 1) persen. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

2. Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar rupiah mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi serta inflasi daerah. Nilai tukar rupiah sampai dengan akhir tahun 2022, diperkirakan masih relatif stabil. Sementara Posisi nilai tukar sampai pada akhir tahun 2021 sebesar Rp. 14.265 per dolar AS. Pada tahun 2023, nilai tukar rupiah diproyeksi berada ada kisaran Rp.

14.300 sampai dengan Rp. 14.800 per dolar AS. Jadi, stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga yang ditunjukkan oleh volatilitasnya yang semakin menurun.

Berikut asumsi makro ekonomi Tahun 2023:

Tabel 3.2 Asumsi Makro Ekonomi

| | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|
| Asumsi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,02 – 5,68 |
| | Inflasi (%) | 3 ± 1 |
| | Nilai Tukar (Rp/USD) | 14.600-14.900 |
| Tambahan Lain | Crude Palm Oil (CPO) (USD/Ton) | 850—900 |
| | Tandan Buah Sawit (TBS)(Rp/Kg) | 1.500 – 3.000 |

Sumber: RKPD Prov Kalbar 2023

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproeksikan Untuk Tahun 2022

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan daerah, yang sangat limitatif sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari

potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati
3. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat lokal
4. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal.

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2021

| No. | Uraian | 2020 | 2021 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2.154.145.653.806,80 | 2.507.322.119.826,13 |
| 4.1 | Pajak daerah | 1.808.971.365.632,98 | 2.121.967.008.054,30 |
| 4.1.01 | Retribusi daerah | 37.138.177.049,00 | 32.044.044.936,00 |
| 4.1.02 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 92.250.362.470,00 | 95.733.394.206,00 |
| 4.1.03 | Lain-lain PAD yang sah | 215.785.748.654,82 | 257.577.672.629,83 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.506.829.941.604,00 | 3.861.438.973.657,00 |

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah | 3.506.829.941.604,00 | 3.861.438.973.657,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG | 4.137.772.450,00 | 45.888.374.706,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 4.137.772.450,00 | 45.888.374.706,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 6.431.288.413.189,13 | 5.665.113.367.860,80 |

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2021 Audited

IV.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan PerUndang Undangan. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Tahun 2023

| Kode | Uraian | Tahun 2022* | Tahun 2023 | Selisih |
|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.672.831.356.527 | 3.029.176.056.332 | 356.344.699.805 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 2.343.271.581.063 | 2.583.486.493.965 | 240.214.912.902 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 13.447.743.000 | 11.941.470.000 | (1.506.273.000) |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 96.368.227.301 | 120.344.680.092 | 23.976.452.791 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 219.743.805.163 | 313.403.412.275 | 93.659.607.112 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.660.721.446.000 | 2.763.254.771.096 | 102.533.325.096 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.660.721.446.000 | 2.763.254.771.096 | 102.533.325.096 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 59.381.168.000 | 59.408.038.000 | 26.870.000 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 59.381.168.000 | 59.408.038.000 | 26.870.000 |
| | JUMLAH | 5.392.933.970.527 | 5.851.838.865.428 | 458.904.894.901 |

Sumber: RKPD Provinsi

Kalimantan Barat 2023

*Keterangan: * = APBD Tahun*

2022

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya, serta pengendalian dari dampak Covid-19.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perUndang Undangan
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Standar Belanja (ASB).
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
6. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang Undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan

- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian target daerah sesuai urusan dan kewenangan.
- d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.
9. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.
 10. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan dampak covid-19, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020
dan 2021

| No. | Uraian | 2020 | 2021 |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | BELANJA | 5.879.356.339.638,35 | 6.303.146.996.599,88 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.967.183.227.722,35 | 4.227.689.006.581,02 |
| 5.1.0 | Belanja Pegawai | 1.400.413.840.649,00 | 1.414.460.424.189,00 |
| 5.1.0 | Belanja Barang dan Jasa | 848.372.455.442,95 | 1.608.232.257.377,34 |
| 5.1.0 | Belanja Hibah | 1.717.684.431.630,40 | 1.199.201.799.614,68 |
| 5.1.0 | Belanja Bantuan Sosial | 712.500.000,00 | 5.794.525.400,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 759.257.928.664,00 | 927.107.860.128,00 |
| 5.2.0 | Belanja Tanah | 2.764.248.864,00 | 2.215.067.174,00 |
| 5.2.0 | Belanja Peralatan dan Mesin | 308.290.811.314,00 | 188.911.136.885,00 |
| 5.2.0 | Belanja Gedung dan Bangunan | 299.731.449.218,00 | 459.483.907.405,00 |
| 5.2.0 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 142.385.503.594,00 | 255.562.950.630,00 |
| 5.2.0 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 813.645.425,00 | 20.934.798.034,00 |
| 5.2.0 | Belanja Aset Lainnya | 5.272.270.249,00 | 0,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 208.111.031.257,00 | 1.695.901.477,00 |
| 5.3.0 | Belanja Tak Terduga | 208.111.031.257,00 | 1.695.901.477,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 944.804.151.995,00 | 1.146.654.228.413,86 |
| 5.4.0 | Belanja Bagi Hasil | 925.787.991.195,00 | 1.073.859.228.413,86 |
| 5.4.0 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/K | 19.016.160.800,00 | 72.795.000.000,00 |
| | JUMLAH | 5.879.356.339.638,35 | 6.303.146.996.599,88 |

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2021 Audited

V.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Proyeksi belanja daerah tahun 2021 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2023

| Kode | Uraian | Tahun 2022* | Tahun 2023 | Selisih |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | BELANJA | | | |
| 5.1 | BELANJA | 3.605.734.765.57 | 3.654.999.033.93 | 49.264.268.35 |
| | JA | 6 | 2 | 6 |
| 5.1.0 1 | Belanja a | 1.634.880.100.472 | 1.661.823.358.85 9 | 26.943.258.38 7 |
| 5.1.0 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.733.927.884.170 | 1.684.222.998.00 8 | (49.704.886.16 2) |
| 5.1.0 5 | Belanj a | 229.333.078.852 | 308.294.750.126 | 78.961.671.27 4 |
| 5.1.0 6 | Belanj a Bantu | 7.593.702.082 | 657.926.939 | (6.935.775.143) |
| 5.2 | BELANJA | 896.649.751.630 | 1.147.872.112.5 | 251.222.360.9 |
| | JA | | 68 | 38 |
| 5.2.0 1 | Belanja Modal | 2.771.900.904 | 34.189.000 | (2.737.711.904) |

| | | | | |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.0 2 | Belanj a | 137.774.868.819 | 199.067.532.293 | 61.292.663.47 4 |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|

| Kode | Uraian | Tahun 2022* | Tahun 2023 | Selisih |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Peralatan dan | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan | 390.351.866.782 | 411.184.505.294 | 20.832.638.512 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, | 315.419.087.554 | 490.699.472.231 | 175.280.384.677 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap | 49.814.076.471 | 44.766.105.000 | (5.047.971.471) |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset | 517.951.100 | 2.120.308.750 | 1.602.357.650 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 0 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 0 |
| 5.4 | BELANJA | 1.152.032.982.745 | 1.288.108.720.100 | 136.075.737.355 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.089.637.982.745 | 1.218.793.720.100 | 129.155.737.355 |

| Kod | Uraian | Tahun 2022* | Tahun 2023 | Selisih |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4.0 2 | Belanja Bantuan Keuang | 62.395.000.000 | 69.315.000.000 | 6.920.000.000 |
| JUMLA | | 5.684.417.499.95 | 6.120.979.866.60 | 436.562.366.64 |

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2023

Keterangan: * = APBD tahun 2022

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2021, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksi mengalami defisit. Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ketahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Perkiraan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang diperkirakan.

Sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan 2020

| No. | Uraian | 2020 | 2021 |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 577.262.139.696 17 | 313.019.167.918 62 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun | 577.262.139.696 ,17 | 313.019.167.918 ,62 |
| 6.2 | PENGELUAR AN | 50.000.000.000, 00 | 55.000.000.000, 00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah | 50.000.000.000, 00 | 55.000.000.000, 00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 527.262.139.696 17 | 258.019.167.918 62 |

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2021 Audited

Tabel 6.2
**Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022
dan 2023**

| Kode | Uraian | Tahun 2022* | Tahun 2023 | Selisih |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN | 341.483.529.4 24 | 319.141.001.17 2 | (22.342.528.25 2) |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun | 341.483.529.4 24 | 319.141.001.17 2 | (22.342.528.25 2) |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 341.483.529.4 24 | 319.141.001.17 2 | (22.342.528.25 2) |
| 6.2 | PENGELUARAN | 50.000.000.0 00 | 50.000.000.000 | - |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal | 50.000.000.0 00 | 50.000.000.000 | - |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| Jumlah Pengeluaran | 50.000.000.0 00 | 50.000.000.000 | - |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|

*Keterangan: * = APBD tahun 2022*

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu terus dikembangkan. Program dan kegiatan yang searah mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai dengan berbagai skema dengan memperhatikan kapasitas fiskal. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang telah dirancang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Daerah Tahun 2018-2023

| | |
|--|----------------|
| VISI | |
| Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan | |
| TUJUAN | SASARAN |
| (1) | (2) |
| Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur | |

| | |
|--|--|
| <p>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar 3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan Sesuai Dengan Indeks Desa Membangun dan Pemukiman Perkotaan 5. Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi 6. Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat |
| <p>Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i></p> | |

| | |
|---|---|
| <p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah 2. Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan di Kalimantan Barat 3. Terlaksananya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi 7. Meningkatnya pengadaan barang jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) |
| <p>Misi 3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Literasi 2. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Kualitas Pemuda 4. Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender 5. Meningkatkan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender 6. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah |
| <p>Misi 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi 3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa 4. Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM 5. Meningkatnya Kesejahteraan petani dan nelayan 6. Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat 7. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kerja 8. Ketersediaan lahan transmigrasi |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | 9. Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan |
| Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib | |
| Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Skor Indeks Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Meningkatnya Jumlah Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi 4. Menurunnya Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat 5. Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat |
| Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan | |
| Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara 2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan 3. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat |

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama lima

tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana

pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah Untuk tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Sedangkan tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah “peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat”. Adapun tahapan untuk tahun kelima (2023) dalam RPJMD Kalimantan Barat adalah “Tahap Pemantapan (Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia, Produktivitas Masyarakat, dan Daya Saing Daerah)”. Tahap pemantapan sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pemantapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan di sekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Penangan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang lebih parah dengan segala dampak yang mengikutinya.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan target indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 71.24 poin. Maka perlu dilakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

- a. Rasio Elektrifikasi, dalam rangka mendukung sasaran rasio elektrifikasi tahun 2023 sebesar 93.00% maka prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan

mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN, fasilitasi perizinan penyediaan listrik Non PLN, penyediaan listrik bagi Rumah Tangga Miskin yang belum terakses listrik, fasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan

excess power dari industri perkebunan dan pertambangan, serta mendorong peran serta para pihak tersebut diatas untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.

- b. Kondisi Jalan Mantap sebesar 80% dalam rangka untuk mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Proyek Strategis Nasional, dengan melakukan penanganan skala prioritas seperti penanganan jalan dengan kondisi rusak (berat dan ringan) serta pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penanganan jalan dengan kondisi rusak di sekitar wilayah usaha guna meningkatkan akses perekonomian, membuka pengembangan wilayah, membuka keterisolasian, meningkatkan akses mobilitas dan kelancaran lalu lintas.
- c. Jaringan irigasi Provinsi dalam kondisi baik sebesar 61,21%; guna mendukung indikator persentase Irigasi Provinsi, maka prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah: melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi rusak (berat dan ringan) yang difokuskan pada lahan pertanian yang produktif dan potensial, dalam upaya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
- d. Persentase penduduk yang berakses air minum sebesar 70.00%, guna mendukung indikator persentase penduduk yang berakses air minum maka prioritas pembangunan lintas Kab/Kota yang akan dilakukan adalah: pembangunan kapasitas air baku, peningkatan cakupan pelayanan akses air bersih, pengembangan jaringan air bersih, peningkatan

kerjasama antar daerah, penguatan dokumen perencanaan yang berbasis spasial serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) air bersih.

- e. Dalam rangka untuk mendukung indikator pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) sebesar 52.00% prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah: Membangun pelayanan sanitasi lintas Kab/Kota serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi.
 - f. Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dilakukan adalah: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
 - g. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan adalah: meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), serta mendorong percepatan pelayanan perhubungan udara dan perkeretaapian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip- Prinsip Good Governance

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi

dengan target pada tahun 2023 meningkat menjadi nilai A, dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 ditargetkan meningkat menjadi nilai A.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan sebesar 88.77%
- b. Pengelolaan Pemerintahan desa dengan meningkatnya persentase indeks Desa Membangun sebesar 73.89%
- c. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dengan persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat sebesar 82.14%.
- d. Penataan administrasi kependudukan melalui persentase kepemilikan E-KTP sebesar 99.00%, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 55.00%, persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sebesar 95.00%, persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun sebesar 97.00%, persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan sebesar 75%, persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan sebesar 100%, persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan sebesar 75.00%, persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid sebesar 95.00%, persentase capaian Penyusunan Profil Kependudukan sebesar 100%, persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95.00%.
- e. Persentase perangkat daerah dengan zona hijau sebanyak 100.00% dan persentase total bobot domain evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 92.00%.

Kemudian, dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip Good Governance, prioritas pembangunan diarahkan pada penyelesaian penegasan batas daerah, khususnya daerah yang memiliki potensi konflik lahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial berskala besar. Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, pada tahun 2020 terdapat 214 (delapan puluh tujuh) desa mandiri sedangkan pada Tahun 2021 jumlah desa mandiri di Kalimantan Barat sebanyak 385 desa. Maka pembangunan dalam tahap sekarang lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 425 desa mandiri.

3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia yang

ditargetkan meningkat menjadi 71.25 pada tahun 2023 akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran antara lain:

- a. Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Mutu Pendidikan melalui peningkatan Rata-rata Lama Sekolah menjadi hingga 8.2 tahun, Harapan Lama Sekolah selama 13.2 tahun, dan Skor Mutu Pendidikan sebesar 6 poin.
- b. Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indikator Angka Harapan Hidup selama 70.99 tahun dan status akreditasi rumah sakit paripurna dengan Indeks kepuasan masyarakat dengan status sangat baik.
- c. Meningkatnya pembangunan kebudayaan dengan nilai

indikator pembangunan kebudayaan sebesar 45.28 poin.

- d. Meningkatnya literasi masyarakat yang ditandai dengan indikator cakupan kunjungan perpustakaan pada tahun 2023 sebesar 141.570, jumlah koleksi daerah yang dilestarikan sebanyak 6.692 koleksi, Nilai Budaya Literasi sebesar 54 poin, Indeks Kepuasan

layanan perpustakaan pada predikat A (sangat baik) sehingga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat tercapai pada 13,76 poin.

- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 80,5
 - f. Meningkatnya keterwakilan perempuan melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat sebesar 67.46.
 - g. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dengan persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk sebesar 53.00%.
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02 - 5.68, penurunan angka kemiskinan menjadi 7.08-7.00 dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5.42 - 3.98, maka penanggulangan kemiskinan sebagai akar permasalahan sosial menjadi prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menekan angka kemiskinan maka pengangguran memiliki kaitan erat karena berpengaruh pada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari itu, pengangguran bukan lagi masalah pribadi, namun menjadi masalah bersama yang harus diatasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat sekitar. Menurunkan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus

diselesaikan bersama untuk meningkatkan kinerja ekonomi negara. Dalam rangka mewujudkan misi ini maka akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran yaitu:

- a. Dalam rangka meningkatkan Jumlah Nilai Investasi diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan, penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi, dan mengurangi kesenjangan antara minat investasi dan realisasinya. Begitu pula untuk meningkatkan mutu pelayanan diarahkan agar dapat mengoptimalkan terintegrasinya sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM RI dengan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang dikelola oleh Kemenkominfo.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu peningkatan produksi, peningkatan kualitas produk, memproduksi produk turunan atau peningkatan nilai tambah dan lainnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB sektor seperti terlihat di bawah ini:
 - 1) Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan dilakukan melalui peningkatan produksi dan populasi ternak yang sehat dan aman konsumsi merupakan sasaran yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyediaan sumber pangan protein asal hewan merupakan langkah strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sumber pangan yang terjangkau baik jumlah maupun kualitasnya. Produk ternak yang sehat dan aman konsumsi juga merupakan prasyarat daya saing pasar produk

peternakan.

- 2) Meningkatnya Jumlah Produksi dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian (alsin; pengairan; lahan; dan sarana produksi), Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu, Optimalisasi

penerapan dan pemanfaatan teknologi budi daya, dan meningkatkan pengawasan, produksi dan peredaran benih tanaman serta menurunkan luas serangan hama dan penyakit tanaman.

- 3) Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB Perkebunan dan produksi perkebunan dilakukan dengan mensinergikan sumber daya perkebunan untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang produktif melalui pemanfaatan teknologi budi daya dan pengolahan yang baik (GAP & GHP) didukung pengembangan kemitraan usaha serta penanganan Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim serta Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perkebunan dan mendorong peningkatan kinerja perkebunan besar.
- 4) Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB Perikanan dilakukan dengan Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan hygiene.
- 5) Meningkatnya pertumbuhan PDRB Kehutanan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari, pemberian akses pengelolaan sumber daya hutan yang berkerakyatan dan berkeadilan melalui pengembangan perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, kemitraan kehutanan), dan optimalisasi sistem informasi publik dibidang kehutanan dan penyelenggaraan pembangunan kehutanan.

- 6) Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Tahun 2023 dengan upaya mengoptimalkan Pelabuhan Internasional Kijing (asumsi 2021 telah beroperasi)

akan meningkatkan transaksi perdagangan ekspor impor terutama dari sisi ekspor. Menurunkan inflasi bahan makanan dengan mengawasi ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta melindungi hak hak konsumen dalam mengkonsumsi barang yang beredar sesuai dengan peraturan dan tertib niaga yang berlaku.

- 7) Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor industri Tahun 2023 perlu upaya dalam percepatan hilirisasi industri dengan mendukung pembangunan berbasis kewilayahan seperti Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Mikro. Meningkatkan kerjasama guna meningkatkan investasi industri (PMA dan PMDN) dan penyerapan tenaga kerja sektor industri. Melaksanakan promosi dan pemasaran dengan meningkatkan kualitas produk IKM Kalimantan Barat.
- c. Peningkatan nilai NTP salah satunya dipengaruhi oleh faktor produksi, konsumsi petani, hasil produksi yang mereka hasilkan dan pemasaran produk. Beberapa upaya peningkatan NTP dapat dilihat di bawah ini:
- 1) Meningkatnya NTP Peternakan dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan peternak, maka pemberdayaan peternak untuk mampu meningkatkan nilai tambah kegiatan peternakan, serta daya saing produk peternakan. Membangun kawasan berbasis korporasi adalah salah satu wujud pemberdayaan peternak, dimana pemerintah memfasilitasi peternak untuk mengelompok dalam satu kawasan, dan membangun keterpaduan pelayanan peternakan dari

sektor hulu produksi hingga ke hilir, yaitu jaminan pasar dan kepastian harga yang diterima peternak.

- 2) Meningkatnya NTP Tanaman Pangan dan NTP Tanaman Hortikultura dilakukan dengan Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian melalui Pembinaan, pengembangan dan penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani, penguatan, fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluh pertanian.

- 3) Meningkatnya NTP Perkebunan dilakukan dengan memfasilitasi usaha perkebunan rakyat yang berwawasan agribisnis serta mensinergikan Sumber daya Perkebunan melalui pengembangan SDM & kelembagaan pekebun, diversifikasi, teknologi pasca panen (GMP) dan promosi produk.
- 4) Meningkatnya NTP Perikanan dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir serta meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka meningkatkan skor PPH di Kalimantan Barat perlu peningkatan pada tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merupakan ketersediaan pangan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Keterjangkauan pangan menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan

menjamin kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal.

Misi mewujudkan Masyarakat Sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,02 – 5,68 %, Gini Rasio ditargetkan menjadi 0,321 – 0,318, Jumlah Desa Mandiri menjadi 425, Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7,08 - 7,00 % pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 5,53 - 4,29 % pada tahun 2023.

5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib

Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib pada prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, maka upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran dapat berupa:

a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana.

Dalam rangka mewujudkan meningkatkan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana prioritas pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas daerah rawan bencana melalui pembentukan POKMAS/ DESTANA di daerah rawan bencana serta peningkatan kapasitas personil yang dilatih/ diberi pengetahuan, kajian risiko bencana pada daerah rawan bencana, rencana penanggulangan bencana, fasilitasi pembentukan TRC pada kabupaten/ kota dengan indeks Risiko Bencana Tinggi, serta penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

b. Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian

Logistik Pada Daerah Terkena Bencana.

Dalam rangka meningkatkan penanganan kedaruratan dan pendistribusian logistik pada daerah terkena bencana prioritas

pembangunan diarahkan pada upaya penyediaan logistik dan penanganan bencana yang terjadi.

- c. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Dalam rangka meningkatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana prioritas pembangunan diarahkan pada upaya inventarisasi kerugian pasca bencana dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka menurunkan luas Kerusakan Kawasan Hutan dan lahan prioritas pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat dalam dan sekitar hutan melalui pemanfaatan potensi hutan dan lahan, peningkatan tutupan hutan dan lahan pada hutan dan lahan kritis, fasilitasi pembangunan areal konservasi pada kegiatan usaha berbasis lahan, penyelamatan hutan pada areal penggunaan lain dengan tingkat konservasi tinggi (gambut lindung dan kubah gambut), areal berhutan di APL pada sepanjang sempadan sungai/ lahan dengan kemiringan curam, habitat satwa khas Kalimantan Barat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan tembawang, pembangunan hutan rakyat / hutan adat.

Misi mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan yang ditandai dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, dimana pada tahun 2023 ditargetkan 66,80. Pencapaian target ini akan dicapai dengan

upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran yaitu menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan indikator Indeks Tutupan Kualitas Lahan

sebesar 64,483. Untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) serta dalam kajian dampak lingkungan, peningkatan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan, meningkatkan pembinaan kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pengendalian pencemaran air dan udara, meningkatkan peran masyarakat/kelompok masyarakat, sekolah dan swasta untuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas air, udara dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
- b. Meningkatkan kualitas tutupan lahan melalui perlindungan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan, perlindungan areal berhutan di Areal Penggunaan Lain (APL), pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), perlindungan ekosistem Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan mangrove, rehabilitasi lahan kritis baik yang berada didalam dan diluar Kawasan hutan, serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- c. Dalam rangka mendorong peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup tersebut pada tahun 2023 akan dilaksanakan penetapan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2034 serta melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh Forum Penataan Ruang dan Sistem Informasi Penataan

Ruang.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pontianak, 16 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum